

ABSTRAK

Alokasi Dana Desa merupakan salah satu penerimaan keuangan Desa yang bersumber dari Pemerintah Daerah yaitu dari bagian dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota diluar DAK (DAU dan DBH) sebesar 10%. Dan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya, meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi, meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa, mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa. Studi implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dalam penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Jayabakti Kecamatan Cabangbungin Kabupaten Bekasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode teknik pengumpulan data menurut Sugiono yaitu Observasi, Wawancara, dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori dari Edward III, bahwa untuk mengukur suksesnya implementasi kebijakan ada beberapa indikator diantaranya: Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Jayabakti Kecamatan Cabangbungin Kabupaten Bekasi dari segi komponen pemerintahan desa jayabakti sudah efektif. Hal ini ditandai dengan beberapa indikator dimulai dari sumber daya manusia, informasi dan sarana yang memadai serta pemahaman perangkat desa yang sudah mengetahui kegunaan dari kebijakan Alokasi Dana Desa serta prosedur yang telah dijalani sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku, tetapi perlu catatan bahwa komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa ini perlu diperhatikan, baik komunikasi vertical antar SKPD atau Masyarakat setempat juga dalam pelaksanaan perencanaan dengan pelaksanaan dilapangan terdapat sebuah perbedaan yang mencolok dan hal ini menandakan konsistensi dan kejelasan dari pelaksana kebijakan ini belum cukup optimal serta hal-hal lain yang diluar dugaan dapat mengganggu pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Jayabakti kecamatan Cabangbungin Kabupaten Bekasi.

Kata kunci : Pelaksanaan, Kebijakan, Alokasi Dana Desa

ABSTRACT

The Village Fund Allocation is one of the Village's financial revenues sourced from the Regional Government, namely from the share of balancing funds received by districts/cities outside of DAK (DAU and DBH) of 10%. And aims to improve the administration of village government in carrying out government, development and community services according to their authority, increasing the capacity of community institutions in the village in planning, implementing, and controlling development in a participatory manner according to potential, increasing income distribution, employment opportunities and business opportunities for village communities. , encourage the increase of self-help of the village community. The study of policy implementation is a very complex process. This study aims to determine the implementation of the use of Village Fund Allocation in Jayabakti Village, Branchbungin District, Bekasi Regency. This study uses qualitative research methods with data collection techniques according to Sugiono, namely observation, interviews, and documentation. Then the data analysis techniques used are data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The theory used in this study is the theory of Edward III, that to measure the success of policy implementation there are several indicators including: Communication, Resources, Disposition and Bureaucratic Structure. The results of this study indicate that the implementation of the Village Fund Allocation in Jayabakti Village, Branchbungin District, Bekasi Regency in terms of components of the Jayabakti village government has been effective. This is marked by several indicators starting from human resources, adequate information and facilities as well as understanding of village officials who already know the usefulness of the Village Fund Allocation policy and the procedures that have been carried out are in accordance with applicable regulations, but it should be noted that communication in policy implementation The allocation of this Village Fund needs to be considered, both vertical communication between SKPD or local communities as well as in the implementation of planning and implementation in the field there is a striking difference and this indicates that the consistency and clarity of implementing this policy is not optimal enough and other things that are unexpected can interfere with the implementation of the Village Fund Allocation policy in Jayabakti Village, Branchbungin sub-district, Bekasi.

Keywords: Implementation, Policy, Allocation of Village Funds